

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Amiruddin. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Diantha. (2018). *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Disertasi*. Denpasar: Swasta Nulus.
- Efendi, D. J. (2020). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (1st ed.). Jakarta: Kencana.
- Fifik, Wiryani, S. M. M., (2018). *Hukum Agraria*. 1 ed. Malang: Setara Press.
- Hartanto, A. (2020). *Hukum Pertanahan Karakteristik Jual Tanah Yang Belum Terdaftar Hak Atas Tanahnya*. Surabaya: Laksbang Justitia.
- Ishaq, S. M. (2017). *Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis serta disertasi* (1st ed.). Bandung: Alfabeta.
- Ishaq, S. M., (2017). *Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis serta disertasi*. 1st ed. Bandung: Alfabeta.
- Isnaini dan Anggreni A. Lubis. (2022). *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Medan: Pustaka Prima
- Jonaedi Efendi, S. M., (2020). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. 1st ed. Jakarta: Kencana.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Kamus versi online/daring (dalam jaringan)*.
- Kurniawan, L. J. (2017). *Hukum Dan Kebijakan Publik*. Malang: Setar Press.
- Limbong, B. (2014). *Bank Tanah*. Jakarta: Margaretha Pustaka.
- Mangku, Dewa, G. D., (2020). *Pengantar Ilmu Hukum*. Klaten: Penerbit Lakeisha.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nugroho, Sigit Sapto. Muhammad Tohari dan Mudji Rahardjo. (2017). *Hukum Agraria Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam.
- Rahman, D. A. (2019). *Penegakan hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar*. Yogyakarta: STPN Press.

- Sahnan. (2016). , *Hukum Agraria Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Santoso, U. (2015). *Perolehan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana.
- Saputra, A. (2015). *Reforma Agraria Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiawan, A. (2020). *Hukum Pertanahan (Pengaturan, Problematika, Dan Reformasi Agraria)*. Surabaya: Laksbang Justitia.
- Soekanto, S. (2014). *Penelitian Hukum Normatif* (3rd ed.). Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soekanto, Soejono. (2014). *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Solikin, Nur. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Quara Media.
- Supriadi. (2014). *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Supriyadi. (2016). *Aspek Hukum Tanah Aset Daerah (Menemukan Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Atas Eksistensi Tanah Aset Daerah)*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Suyanto. (2019). *Hapusnya Hak Atas Tanah Akibat Penitipan Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Surabaya: Jakad Publishing Surabaya.
- Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Waluyo, B. (2008). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waskito. (2016). *Bunga Rampai Agraria, Tata Ruang, dan Pertanahan (Teori dan Praktek Penyelenggaraan)*. Malang: Aditya Media.
- Wiryani, F. (2018). *Hukum Agraria* (1 ed.). Malang: Setara Press.
- Yazid, Fadhil. (2020). *Pengantar Hukum Agraria*. Medan: Undhar Presss.

ARTIKEL DALAM JURNAL

- Afdhali, D. R., syahuri, T. (2023). Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum. *Collegium Studiosum Journal*. Volume 6, Nomor 2 (hlm. 555-561).
- Andin, A. N. (2020). Akibat Hukum Hilangnya Hak Milik Atas Tanah Yang Ditelantarkan. *Journal: National Conference on Law Studies* . Volume 2, Nomor 1 (hlm.539-551).

- Atmaja, D. G. (2018). Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum. *Jurnal Kertha Wicaksana*. Volume 12, Nomor 2 (hlm. 145- 155).
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*. Volume 7, Nomor 1 (hlm. 20-33).
- Chakim, M., L. (2015). Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*. Volume 12, Nomor 2 (hlm.328-352).
- Dumais, R. O., 2014. Pengaturan Hukum Terhadap Keberadaan Tanah Terlantar Di Indonesia. *Journal Lex et Societatis*. Volume 2, Nomor 5 (hlm. 39- 50).
- Elbert. (2021). Analisa Hukum Atas Tanah Hak Milik Yang Terlantar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2021 tentang Penerbitan Kawasan Dan Tanah Terlantar. *Jurnal Hukum Adigama*. Volume 4, Nomor 2 (hlm. 2945-2969).
- Fatihah, A., 2023. Kajian Hukum Penertiban Tanah Terlantar Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahum 2021 Tentang Penertiban Tanah Terlantar. *Jurnal Notarius*. Volume 2 , Nomor 1 (hlm. 22-31).
- Gabriella, G. (2023). Tanggungjawab Pemerintah Terhadap Penanggulangan Tanah Terlantar. *Tadulako Master Law Journal*. Volume 7 , Nomor 1 (hlm. 1-17).
- Ganindha, R. (2016). Urgensi Pembentukan Kelembagaan Bank Tanahsebagai Alternatif Penyediaan Tanah Bagi Masyarakat Untuk Kepentingan Umum. *Jurnal Rena Hukum*. Volume 9, Nomor 3 (hlm. 442-461).
- Indirakirana, A., Dantes, K. F., & Setianto, M. J. (2022). Implementasi Perwalian Terhadap Anak Di Bawah Umur Pada Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Jual Beli Di Kota Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*. Volume 5, Nomor 2 (hlm. 414-430).
- Julyano, M. & Sulistyawan, A., Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positive Hukum. *Jurnal Crepido*. Volume 01, Nomor 01 (hlm. 13-23)
- Kristyan, F. (2021). Peran Kantor Pertanahan Untuk Penertiban Dan Pemanfaatan Tanah Terlantar Di Kota Semarang. *Jurnal Notarius*. Volume 14, Nomor 1 (hlm. 628-639).

- Limbong, D. (2017). Tanah Negara, Tanah Terlantar Dan Penertibannya. *Jurnal Mercatoria*. Volume 10, Nomor 1 (hlm. 1-9).
- Nurlinda, I. (2014). Perbandingan Penanganan Tanah Terlantar di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Sukabumi dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Volume 21, Nomor 1 (hlm. 120-138)
- Prasista, P. A. D., Wijaya, K. K. A., & Suryani, L. P. (2022). Pengaturan Tanah Terlantar dalam Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pertanahan. *Jurnal Konstruksi Hukum*. Volume 3, Nomor 3 (hlm. 515-520).
- Putra, I. B. (2024). Rekonstruksi Kebijakan Penertiban Tanah Terlantar Wilayah Indonesia Perspektif Teori Hukum Tanah dan Etika Lingkungan. *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan*. Volume 9, Nomor 1 (hlm 17-38)
- Retnowati, T. (2024). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Pemilik Hak Atas Tanah Terlantar. *Lex Journal : Kajian Hukum & Keadilan*. Volume 8, Nomor 2 (hlm. 255-275).
- Saiful, W. M. (2024). Pemanfaatan Tanah Terlantar Berdasarkan Permen Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 20 Tahun 2021. *Journal Justness: Jurnal Hukum Politik dan Agama*. Volume 4, Nomor 1 (hlm. 1-17).
- Santoso, U. (2017). Eksistensi Berlakunya Pencabutan Hak Atas Tanah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. *Jurnal Perspektif*. Volume 22, Nomor 1 (hlm. 41-54).
- Sinjar, M. A. (2023). Pemanfaatan Tanah Terlantar Dan Problematika Hukumnya. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat 2023*. Volume 5, Nomor 1 (hlm.116-126).
- Sitio, B. Y. (2022). Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar Menurut Peraturan Perundang-Undangan. *Journal law review*. Volume 1, Nomor 1 (hlm. 175-203).
- Sitorus, S. (2018). Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasai, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet). Volume 15, Nomor 1 (hlm.63-71)

- Thenny, B. B., 2024. Kajian Yuridis Pemanfaatan Tanah Terlantar Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan Dan Tanah Terlantar. *Journal Lex Administratum*. Volume 12, Nomor 2 (hlm. 1-14).
- Utami, L. P. (2021). Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar). *Journal NOTARIUS*. Volume 14, Nomor 1 (hlm. 566-579).
- Zarbiyani, F. (2023). Penetapan Tanah Terlantar Sebagai Bentuk Perlindungan dan Kepastian Hukum dalam Penertiban Kawasan Tanah Terlantar. *Jurnal UnesL Aw Review*. Volume 6, Nomor 2 (hlm 5195-5201).

ARTIKEL ELEKTRONIK

- Brilian, A. P. (2024, Desember 06). *Siapkan 79 Ribu Ha Tanah Terlantar buat 3 Juta Rumah, Ini Datanya*. Retrieved from detikProperti: <https://www.detik.com/properti/berita/d-7673898/bpn-siapkan-79-ribu-ha-tanah-terlantar-buat-3-juta-rumah-ini-datanya>
- Chrislianto, Eka Kurnia. 2023. Membedakan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata. Tersedia pada [https://www.lawyerpontianak.com/2023/03/membedakan-putusan-pengadilan-dan.html#:~:text=Dalam%20Putusan%20ada%20%20\(dua,sebagai%20Pemohon%20dan%20Fatau%20Termohon.](https://www.lawyerpontianak.com/2023/03/membedakan-putusan-pengadilan-dan.html#:~:text=Dalam%20Putusan%20ada%20%20(dua,sebagai%20Pemohon%20dan%20Fatau%20Termohon.)
- Jogjalawakarta. 2024. Perbedaan Putusan dan Penetapan Hakim. Tersedia pada <https://jogjalawakarta.com/perbedaan-putusan-dan-penetapan-hakim/>
- Jogjalawakarta. (2023, Maret 31). Retrieved from Jogjalawakarta: <https://jogjalawakarta.com/pengadilan/>

SKRIPSI

- Abidin, Ahmad Zainul. 2024. Tinjauan Yuridis Sengketa Tanah Kepemilikan Yang Diduduki Secara Melawan Hukum Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia (Studi Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Krs), Universitas Pendidikan Ganesha.

Hamsyah, Y. Y. D., 2021. Mekanisme Penetapan Hak Atas Tanah Terlantar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan Dan Tanah Terlantar, Universitas Semarang.

Raviarda, M. A. (2023). Akibat Hukum Terhadap Tanah Terlantar Di Tinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan Dan Tanah Terlantar. Universitas Islam Malang.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14. Tambahan Lembaran Negara Nomor 39. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Tambahan Lembaran RI Nomor 2043. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 4. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Atas Tanah. Lembaran Negara RI Tahun 1996. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 59. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran RI Nomor 3740. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran RI Nomor 5098. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran RI Nomor 6632. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Terlantar. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 813. Sekretariat Negara. Jakarta.

